

BAB II

PRINSIP NON INTERVENSI SEBAGAI NORMA INTERNASIONAL DI

KAWASAN ASIA TENGGARA

2.1 Pembentukan Masyarakat Internasional ASEAN

Bagian ini akan menganalisis unsur-unsur masyarakat internasional English School dalam sejarah pembentukan dan perkembangan ASEAN. Unsur-unsur tersebut berkaitan dengan definisi masyarakat internasional menurut Hedley Bull, yakni sekelompok negara yang membentuk suatu ikatan masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan nilai, serta bekerja dalam lembaga bersama.⁴³

2.1.1 Situasi Kawasan Asia Tenggara

Negara memegang peran penting sebagai titik awal hubungan internasional sekaligus prasyarat utama dalam pembentukan masyarakat internasional. Keberadaan negara harus ditunjang oleh kedaulatan yang menjadi landasan dalam bertindak dan membuat kebijakan. Aspek kedaulatan ini meliputi dimensi internal dan eksternal, termasuk faktor faktual dan normatif yang mengokohkan legitimasi suatu negara.⁴⁴ Secara geografis dan historis, negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk suatu kelompok yang terbentuk dari pengalaman budaya dan latar belakang etnis yang serupa. Sebagian besar negara-negara tersebut mengalami fase kolonialisme sebelum akhirnya meraih kemerdekaan. Pada abad ke-19, bagian Asia Tenggara daratan yang terdiri dari Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos,

⁴³ Bull, p. 13.

⁴⁴ *Ibid*, p. 8.

Vietnam, dan Malaysia menjadi arena persaingan antara kolonialisme Inggris dan Perancis. Sementara Asia Tenggara kepulauan, yaitu Singapura, Filipina, dan Indonesia merupakan wilayah kolonialisme Inggris dan Belanda. Thailand tidak mengalami periode kolonialisme maupun perjuangan nasionalis karena Thailand merupakan negara penyangga (*buffer state*) antara wilayah jajahan Inggris dan Perancis.⁴⁵

Meraih kemerdekaan membawa negara-negara di kawasan dihadapkan pada tantangan membangun fondasi bangsa yang mandiri dengan berbekal politik dan ekonomi yang masih lemah. Lemahnya fondasi tersebut mengakibatkan konflik internal berupa perebutan kekuasaan antar rezim di dalam negeri menjadi hal yang umum terjadi. Dinamika perebutan kekuasaan ini berimbas pada kerapuhan ekonomi bangsa yang terlihat dari angka kemiskinan yang tinggi. Tantangan ekonomi ini merupakan permasalahan krusial yang harus diatasi bersama di kawasan, karena jika negara-negara di kawasan mampu membangun dan memperkuat dasar ekonomi yang kokoh dan stabil, maka kesenjangan sosial, ketidakamanan, serta masalah internal dan eksternal dapat diatasi. Para pendiri ASEAN menyadari bahwa stabilitas ekonomi merupakan prasyarat penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk mencegah masalah subversi dan agresi. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi menjadi salah satu target ASEAN.⁴⁶

Strategi politik *divide et impera* yang diterapkan pada masa kolonialisme digunakan untuk memecah-belah komponen geografis dan kelompok etnis di

⁴⁵ Roeslan Abdulgani, *Problem Nasionalisme, Regioalisme, Dan Keamanan Di Asia Tenggara*, 1st edn (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1995), p. 17.

⁴⁶ Durmaz, Ra'ees, and Hossain, p. 299.

wilayah Asia Tenggara. Pembagian yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan keterkaitan budaya dan sejarah antar kelompok di dalam wilayah tersebut, mengakibatkan masyarakat setempat lebih berfokus pada konflik internal dan melupakan fakta bahwa mereka sedang dijajah dan dikuasai oleh bangsa lain. Dampak traumatik dari kolonialisme ini melahirkan perasaan ketidakpercayaan dan saling curiga dalam hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Dalam situasi ini, isu mengenai kedaulatan dan wilayah menjadi sangat sensitif dan kompleks untuk diatasi. Efek dari kebijakan kolonial ini menghambat potensi kerja sama dan memperumit pemahaman serta hubungan diantara negara-negara di kawasan.⁴⁷

Konflik perbatasan antar wilayah kemudian berkembang menjadi isu regional yang mengancam stabilitas dan keamanan kawasan. Pada pertengahan abad ke-19, wilayah Kamboja menjadi arena perebutan kekuasaan antara Thailand dan Vietnam. Wilayah bagian barat berada dibawah kekuasaan Thailand, sementara bagian timur dikuasai oleh Vietnam. Persaingan antara Thailand dan Vietnam untuk mendominasi tanah Kamboja berulang kali muncul terutama setelah perginya Perancis yang dianggap sebagai penghalang jatuhnya Kamboja ke tangan Thailand dan Vietnam.⁴⁸ Setelah berhasil meraih kemerdekaannya pada tahun 1953,

⁴⁷ Abdulgani, *Op. Cit.*, p. 18.

⁴⁸ I Ketut Ardhana, 'Masalah Perbatasan Di Asia Tenggara Dalam Perspektif Sejarah: Pengalaman Indonesia Di Kalimantan Timur', 2006, p. 5 *et. Seq* <http://www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/ketut_ardhana.pdf>.

Kamboja mulai mengangkat permasalahan mengenai kepemilikan Kuil Preah Vihear yang terletak di wilayah perbatasan dengan Thailand.⁴⁹

Presiden Filipina, Diosdado Macapagal semakin memperumit hubungan negaranya dengan Malaysia dengan mengajukan klaim atas kedaulatan Sabah yang didasarkan pada kedekatan historis. Pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI) memicu pertikaian dalam skala kecil di hutan Kalimantan (Borneo) dengan pasukan Malaysia dan Persemakmuran Inggris. Hal ini tentunya tidak menguntungkan bagi militer Indonesia pada saat itu.⁵⁰ Pada tahun 1962, Brunei menghadapi pemberontakan yang diduga diinisiasi oleh Indonesia.⁵¹

Ketidakstabilan keamanan di setiap negara mendorong mereka untuk bergantung pada dukungan dari negara-negara adikuasa. Namun, ketergantungan ini membawa kawasan Asia tenggara menjadi arena persaingan antara negara-negara adikuasa dalam upaya mereka untuk memperluas pengaruh di kawasan. Bantuan tersebut juga tidak secara otomatis menghilangkan potensi munculnya konflik antarnegara di kawasan. Tindakan intervensi tersebut berpotensi mengancam stabilitas keamanan regional. Selain itu, masuknya pengaruh komunisme di kawasan semakin memperparah situasi yang ada.⁵²

Para nasionalis memandang komunisme internasional sebagai suatu ideologi yang tidak memiliki toleransi, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai

⁴⁹ Tia Nurfadhilah, 'Hubungan Bilateral Thailand Dan Kamboja Pasca Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear', *E-Library Unikom* (Universitas KomputerIndonesia, 2017), p. 2 <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/741/jbptunikompp-gdl-tianurfadh-37031-1-unokom_4-1.pdf>.

⁵⁰ M.G Ricklefs and others, *Sejarah Asia Tenggara Dari Masa Prasejarah Sampai Komtemporer*, ed. by Tim Komunitas Bambu, 1st edn (Depok: Komunitas Bambu, 2013), p. 686 *et. Seq.*

⁵¹ Chong Ja Ian, 'ASEAN's Non-Intervention and the Myanmar Conundrum', ed. by Choi Shing Kwok, *ASEANFOCUS* (ISEAS Yusof Ishak Institute, 2021), p. 6 (p. 6) <www.iseas.edu.sg>.

⁵² Durmaz, Ra'ees, and Hossain, *Op. Cit.*, p. 299.

nasional yang erat kaitannya dengan prinsip toleransi. Asumsi ini timbul terutama karena mayoritas intelektual yang turut mengembangkan gerakan nasionalisme di dalam negeri, mendapatkan pendidikan dari negara-negara Barat.⁵³ Setelah masa penjajahan berakhir, sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara beralih ke sistem politik demokrasi. Sistem demokrasi dianggap sebagai model yang dapat menjamin pluralitas dan persamaan hak serta tanggung jawab di antara warga negara. Penggunaan demokrasi pada awal era kemerdekaan ini berkaitan erat dengan pengaruh para penjajah yang mengwariskan model ini kepada pemimpin-pemimpin nasionalis. Alasan tersebut membuat negara-negara Barat berupaya mencegah penyebaran paham komunisme yang berpotensi mendominasi wilayah Asia Tenggara. Kondisi ini semakin diperkuat oleh perkembangan Uni Soviet sebagai kekuatan nuklir nomor dua di dunia, yang mendorong Amerika Serikat menempatkan anti komunisme sebagai elemen utama dalam kalkulasi kebijakannya.⁵⁴

Setelah ketegangan dalam Perang Dingin mereda, munculnya China sebagai kekuatan baru dalam panggung politik internasional memberikan dinamika baru dalam kawasan Asia Tenggara. Situasi ini semakin kompleks karena terjadi keruntuhan blok-blok lama dan persekutuan militer antara negara-negara besar. Konsep politik non-blok yang semula sederhana menjadi semakin kompleks, seiring dengan meningkatnya ketidakpuasan dan kekecewaan di antara negara-negara di kawasan tersebut. Malaysia, Filipina, dan Thailand tetap

⁵³ A Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Asia Tenggara Dari Awal Tumbuhnya Nasionalisme Sampai Terbangunnya Kerja Sama ASEAN*, ed. by Anton Haryono, 4th edn (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2022), p. 6.

⁵⁴ Ricklefs and others, *Op. Cit.*, p. 519 *et. Seqq.*

mempertahankan kecenderungan pro-Barat, namun mereka perlahan mulai mengurangi kedekatan dengan SEATO dan mendirikan organisasi ASA. Di sisi lain, Indonesia mengalihkan orientasinya ke China selama periode Indonesia keluar dari keanggotaan PBB.⁵⁵

Perang Vietnam menjadi konflik regional dengan skala campur tangan terbesar di Asia Tenggara dengan keterlibatan langsung dari Amerika Serikat dan keterlibatan tidak langsung dari Uni Soviet dan Republik Rakyat China (RRC). Serangan Vietnam terhadap Kamboja pada akhir tahun 1978 turut serta menambah peristiwa yang melibatkan campur tangan asing di kawasan. Sengketa ini memicu serangan RRC terhadap Vietnam serta memberi peluang bagi Uni Soviet untuk meningkatkan pengaruhnya melalui pemanfaatan fasilitas militer di Teluk Cam Ranh dan Danang, Vietnam.⁵⁶

Tawaran bantuan yang datang dari Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan kepada pemberontak kedaerahan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) memicu kemarahan Indonesia. Kejadian ini menambah jumlah musuh Indonesia yang mayoritas berada dalam cakupan pengaruh Amerika Serikat atau Inggris. Indonesia akhirnya mencari dukungan militer dari Uni Soviet yang disambut antusias oleh pihak Uni Soviet. Kesempatan ini dimanfaatkan Uni Soviet untuk memperkuat pengaruhnya dalam menghadapi Amerika Serikat dan RRC. Akibatnya, Indonesia semakin menjadi pusat persaingan tiga arah antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan RRC.⁵⁷

⁵⁵ Abdulgani, *Op. Cit.*, p. 28.

⁵⁶ Sabir, *ASEAN Harapan Dan Kenyataan*, p. 124.

⁵⁷ Ricklefs and others, *Op. Cit.*, p. 684.

Ketegangan semakin meningkat dalam hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Ketegangan ini disebabkan oleh pandangan Indonesia yang menganggap Malaysia tidak sepenuhnya berjuang dalam meraih kemerdekaannya seperti yang dilakukan oleh Indonesia serta keputusan Malaysia untuk tetap mempertahankan pengaruh Inggris di negaranya. Terlebih, Malaysia juga turut memberikan dukungan militer kepada pemberontak PRRI yang semakin mempersulit situasi pada saat itu. Menteri Luar Negeri Indonesia yang berhaluan radikal dalam pemerintahan Soekarno, Soebandrio, mendefinisikan sikap politik Indonesia pada tahun 1963 ini sebagai 'konfrontasi'.⁵⁸

Politik konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia semakin membuka pintu bagi intervensi negara-negara asing di kawasan baik secara langsung seperti Inggris yang membantu Malaysia, maupun secara tidak langsung seperti dukungan yang diberikan oleh Uni Soviet dan RRC kepada Indonesia.⁵⁹ Di sisi lain, konflik intra-regional tersebut semakin menambah tekanan diplomatik bagi Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara karena bersamaan dengan meningkatnya keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam. Amerika Serikat mendukung rencana Inggris dan Malaysia sebagai sekutu dalam upaya melawan penyebaran komunisme di kawasan. Di satu sisi, Amerika Serikat juga berharap dapat memenangkan hati Indonesia guna mengurangi radikalisme Indonesia dan ketergantungannya terhadap Uni Soviet serta hubungan persahabatannya dengan RRC. Sementara itu, perkembangan negara-negara tetangga Indonesia juga tidak terlepas dari krisis

⁵⁸ Ricklefs and others, *Op. Cit.*, p. 685.

⁵⁹ Sabir, *Op. Cit.*, p. 123.

internasional dan pengaruh radikalisme. Inggris yang masih berdaulat dan memiliki kekuasaan atas Brunei dan Singapura membuat kedua negara tersebut terus berjuang untuk melepaskan diri dari komitmen kolonialisme. Federasi Malaysia juga mengalami kesulitan dalam reunifikasi dengan Singapura karena permasalahan etnis.⁶⁰

Secara perlahan, kesadaran mulai muncul di kalangan para pemimpin negara-negara di kawasan akan pentingnya bersatu dalam menghadapi berbagai bentuk kolonialisme dan menciptakan stabilitas demi kelangsungan nasionalisme bangsa. Salah satu pendekatan modern untuk melawan kolonialisme adalah dengan cara membentuk organisasi regional. Pada tahun 1961, Association of Southeast Asia (ASA) didirikan dengan Malaysia, Filipina, dan Thailand sebagai anggota. ASA didirikan untuk mendorong kerja sama dalam bidang sosial-ekonomi, budaya, dan menciptakan stabilitas di kawasan. Thailand, sebagai salah satu anggota ASA, berperan aktif dalam meredakan konflik antar negara serta mendorong pembentukan kerja sama regional di Asia Tenggara. Upaya ini dirancang sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi ancaman dari Utara. Menteri Luar Negeri Thailand, Thanat Khoman mengatakan bahwa “negara-negara di luar ASA juga perlu terlibat dalam mencari solusi damai untuk masalah-masalah di kawasan”.⁶¹

Pada awalnya, Indonesia menampilkan sikap yang kurang tertarik dan kurang menaruh perhatian terhadap upaya untuk membangun kesetiakawanan atau solidaritas regional. Hal ini tercermin dari penolakan Indonesia terhadap kerja sama

⁶⁰ Ricklefs and others, *Loc. Cit.*

⁶¹ Sabir, *Op. Cit.*, p. 37 *et Seqq.*

ASA yang diajukan oleh Malaysia pada tahun 1961. Penolakan ini disebabkan oleh asumsi Indonesia yang menganggap ASA memiliki orientasi anti-komunis di saat Indonesia menerapkan pendekatan luar negeri yang berdasarkan pada prinsip non-blok dan menolak menjadi objek pengaruh negara-negara besar. ASA mengalami kegagalan akibat perselisihan antara Filipina dan Malaysia terkait klaim terhadap Sabah dan kurangnya anggota dalam organisasi.⁶²

Dalam rangka mencari solusi konflik antara Filipina dan Malaysia, Presiden Filipina Macapagal, memprakarsai sebuah organisasi baru dengan dasar penyatuan rumpun Melayu antara Filipina dengan gabungan etnis Melayu, Spanyol, dan Amerika Serikat; Malaysia dengan etnis Melayu, Islam, Inggris; dan Indonesia dengan etnis Jawa, Melayu, India, Islam dan Belanda. Pada bulan Agustus 1963, ketiga negara mencapai kesepakatan yang sama untuk membentuk MAPHILINDO (Malaya-Philippina-Indonesia). Sayangnya, persamaan etnis saja tidak cukup kuat untuk mengatasi perbedaan pandangan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing anggota organisasi. Keadaan semakin kompleks dengan masuknya Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia pada September 1963. Kecurigaan Soekarno terhadap pembentukan federasi yang dianggap sebagai upaya berkelanjutan dalam agenda kolonialisasi di Asia Tenggara semakin memperburuk hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Ditambah lagi dengan tindakan Filipina yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia menyebabkan organisasi Maphilindo menjadi lumpuh dan mengalami kegagalan.⁶³

⁶² Martinus Danang, 'Cikal Bakal ASEAN: ASA Dan Maphilindo', *Kompas*, 2020 <<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/cikal-bakal-asean-asa-dan-maphilindo>> [accessed 15 August 2023].

⁶³ *Ibid.*

Sebagai respons terhadap kegagalan dua upaya kerja sama regional sebelumnya, yaitu Association of Southeast Asia (ASA) dan Malaya–Philippina–Indonesia (MAPHILINDO), para pemimpin negara segera membentuk ASEAN. Hubungan negara-negara di kawasan Asia tenggara yang berantakan pada tahun 1963 perlahan mulai membaik berkat kesamaan pandangan politik dan orientasi ideologis yang bersifat non komunis di antara kelima negara pendiri ASEAN, serta menjadi faktor utama dalam membuat situasi kawasan menjadi lebih kondusif.⁶⁴

Runtuhnya rezim Demokrasi Terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno akibat peristiwa berdarah dalam negeri pada tahun 1965-1966 dan digantikan dengan pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto membawa perubahan signifikan dalam pendekatan Indonesia terkait kerja sama regional. Pemerintahan mulai menyadari bahwa untuk menjaga kelangsungan pembangunan nasional, maka stabilitas di dalam negeri harus diutamakan. Jaminan stabilitas nasional tersebut ditunjang oleh stabilitas regional, sehingga pemerintah mulai membangun kerja sama regional. Untuk menuju hal tersebut, langkah awal yang harus ditempuh oleh Indonesia adalah memulihkan kembali kepercayaan dan kredibilitas yang hancur akibat politik konfrontasi dengan Malaysia.⁶⁵ Rezim Soeharto menyadari dampak negatif dari radikalisme dan mengakui dominasi Barat yang secara *de facto* mengungguli pengaruh Uni Soviet dan RRC di Asia Tenggara. Indonesia mulai membangun hubungan kembali dengan negara-negara non komunis dengan tetap menjaga formalitas sebagai negara non-blok. Tindakan ini

⁶⁴ Abdulgani, *Op. Cit.*, p. 30.

⁶⁵ Sabir, *Op. Cit.*, p. 32.

terbukti membawa manfaat bagi Indonesia dengan bantuan yang mengalir dari Jepang dan Amerika. Kembalinya Indonesia sebagai anggota PBB dan IMF berdampak pada pengendalian inflasi dan peningkatan investasi asing di negara tersebut.⁶⁶

Pada tahun 1967, Soeharto adalah salah satu pemrakarsa utama pembentukan kerja sama regional ASEAN. Soeharto memiliki tujuan utama untuk mengembalikan reputasi Indonesia sebagai aktor yang bertanggung jawab di tingkat regional.⁶⁷ Pada awalnya Malaysia meragukan niat baik Indonesia dalam menjalankan kerja sama regional. Pandangan ini mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Menurut Bernard K. Gordon, dalam merespons surat dari Thanat Khoman pada akhir Desember 1966, Menteri Tengku Abdul Rahman dari Malaysia memperingatkan agar tetap waspada dalam mendekati Indonesia, terutama selama Soekarno masih memimpin. Namun, dengan bergantinya periode Orde Lama ke Orde Baru di Indonesia, Malaysia mulai menunjukkan keterbukaan dan kesediaannya untuk membangun kerja sama regional dengan Indonesia. Faktor lain yang mempengaruhi keterbukaan Malaysia adalah ketidakpartisipasian Malaysia dalam kerja sama regional berpotensi mengisolasi negara tersebut dari aktivitas di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tentunya yang tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Malaysia.⁶⁸

Filipina yang sering disebut sebagai "Amerika di Asia" atau "Barat tidak Timur pun tidak" merasa perlu untuk mengubah citra yang merugikan tersebut.

⁶⁶ Ricklefs and others, *Op. Cit.*, p. 688.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Sabir, *Op. Cit.*, p. 35 *et Seqq.*

Oleh karena itu, Presiden Macapagal meluncurkan gagasan Konferensi Melayu Raya (Greater Malay Confederation) pada tahun 1963 dengan tujuan untuk memperlihatkan peran aktif Filipina dalam masyarakat Asia Tenggara. Perubahan kepemimpinan dari Macapagal ke Marcos membantu meredakan sengketa Sabah dengan Malaysia sehingga memulihkan kembali hubungan kedua negara. Inisiatif Presiden Marcos dalam meredakan ketegangan juga terlihat dalam langkahnya mengirim Menlu Narciso Ramos ke Indonesia dan Malaysia dengan harapan untuk mengakhiri konfrontasi. Melalui komunikasi bersama antara Marcos dan Ramos pada April 1966, mereka menyepakati "Persetujuan Manila" sebagai landasan untuk kerja sama saling menguntungkan dan memelihara perdamaian di wilayah Asia Tenggara.⁶⁹

Motivasi Singapura untuk bergabung dalam kerja sama regional didorong oleh kepentingannya untuk memperbaiki hubungan dengan tetangga-tetangganya, terutama Malaysia dan Indonesia, dengan biaya seminimal mungkin. Perbaikan hubungan ini menjadi penting bagi Singapura dalam mencapai keuntungan ekonomi dan keuangan yang maksimal, mengingat Singapura secara ekonomi dan strategis masih terikat dan terhubung dengan Malaysia. Selain itu, Singapura berupaya mengurangi citranya sebagai negara dengan julukan negara "china" atau disebut sebagai perpanjangannya di Asia Tenggara. Bergabungnya Singapura juga disebabkan oleh kekhawatiran negara tersebut akan potensi aliansi negara-negara Melayu yang disebut sebagai "*China island in Malay sea*," sehingga Singapura mengambil langkah-langkah pencegahan dan peluang untuk menghindari hal

⁶⁹ *Ibid*, p. 33.

tersebut. Dengan latar belakang tersebut, Singapura berkontribusi dalam mendorong terbentuknya ASEAN sebagai organisasi regional yang mampu mempromosikan kerja sama dan perdamaian di Asia Tenggara.⁷⁰

Thailand memiliki hubungan yang cukup harmonis dan normal dengan negara-negara calon pendiri ASEAN lainnya. Melalui Menteri Luar Negeri, Thanat Khoman, Thailand berperan aktif untuk membangun kerja sama di kawasan Asia Tenggara, sekaligus mendamaikan negara-negara yang masih terlibat konflik. Setelah situasi konfrontasi mereda, Thanat Khoman melakukan kunjungan bilateral ke Jakarta pada tahun 1966 untuk mendiskusikan terkait pembentukan kerja sama regional baru dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik. Keduanya saling bertukar pikiran dan menyadari bahwa, baik Indonesia maupun Thailand memerlukan solidaritas untuk menciptakan situasi yang damai di regional.⁷¹ Motivasi dan latar belakang negara-negara pendiri tersebut kemudian menjadi pendorong bagi pembentukan ASEAN.

2.1.2 Pembentukan ASEAN

Pada tahap pembentukan ASEAN, Indonesia mengusulkan agar anggota-anggota ASEAN tidak hanya terbatas pada negara-negara yang beraliansi dengan negara adikuasa. Oleh karenanya, dua negara non-blok, yaitu Burma (Myanmar) dan Kamboja mendapatkan tawaran untuk bergabung sebagai anggota ASEAN. Demikian pula, Sri Lanka, yang meruoakan negara non-blok lainnya, juga mengungkapkan minatnya untuk bergabung dengan organisasi ASEAN. Namun,

⁷⁰ *Ibid*, p. 34.

⁷¹ *Ibid*, p. 38 *et Seq.*

implementasi rencana ini mengalami kendala karena Burma menunjukkan sikap kurang berminat dalam merespon tawaran untuk bergabung sebagai anggota. Sama halnya dengan Kamboja yang juga lebih mementingkan situasi di dalam negeri sehingga menunda partisipasinya untuk bergabung dengan organisasi ASEAN. Sri Lanka pada akhirnya tidak melanjutkan niatnya untuk menjadi anggota ASEAN, karena mengutamakan hubungan yang baik dengan Republik Rakyat China. Meskipun demikian, ketidakikutsertaan Sri Lanka memiliki dampak positif dalam konteks geografis, karena memungkinkan ASEAN untuk mempertahankan citra kawasan Asia Tenggara. Disamping itu, keputusan Kamboja untuk tidak bergabung dengan ASEAN pada saat itu merupakan *'blessing in disguise'*, mengingat situasi Kamboja yang dikuasai oleh Vietnam dapat menghadirkan kompleksitas tersendiri bagi pembentukan organisasi ASEAN.⁷²

Mendekati tahap akhir pembentukan kerja sama regional ASEAN, terjadi perdebatan mengenai gagasan Indonesia terkait kehadiran pangkalan militer asing di wilayah Asia Tenggara. Indonesia mengusulkan agar pertahanan bersama negara-negara anggota tidak dimanfaatkan untuk melayani kepentingan khusus negara adikuasa. Pihak Filipina dan Thailand merasa kurang setuju terhadap gagasan tersebut karena status keduanya yang masih sebagai anggota SEATO dan memiliki pangkalan militer asing di wilayah mereka. Akhirnya, gagasan tersebut diubah dengan penegasan bahwa pangkalan asing hanya bersifat sementara dan hanya beroperasi jika diizinkan oleh negara yang bersangkutan. Lebih lanjut, pangkalan-pangkalan asing tersebut tidak dimaksudkan untuk mengancam

⁷² *Ibid*, p. 40 et Seqq.

kemerdekaan nasional negara-negara di kawasan maupun mengganggu proses pembangunan nasional. Kesepakatan mengenai ketentuan pangkalan asing tersebut tercantum dalam Deklarasi Bangkok. Selanjutnya, diskusi mengenai nama organisasi yang sebelumnya bernama Southeast Asia Association for Regional Cooperation (SEAARC) belum memuaskan para anggota. Adam Malik kemudian mengusulkan nama ASEAN yang merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang akhirnya diterima oleh semua anggota dengan persetujuan bersama. Pada tanggal 8 Agustus, dalam sebuah rapat terbuka di Bangkok, Deklarasi Bangkok secara resmi ditandatangani oleh kelima pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura.⁷³

Frasa "*in the spirit of equality and partnership*" yang tercantum dalam ayat pertama tujuan ASEAN dalam Deklarasi Bangkok memiliki makna penting untuk menekankan semangat kerja sama yang setara dan kolaboratif. Selain itu, penggunaan kalimat "melalui usaha bersama" mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang membentuk kerangka kerja sama regional atau tatanan kawasan Asia Tenggara. Secara keseluruhan, pembentukan ASEAN memiliki dua tujuan utama sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, yaitu pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, serta pemeliharaan perdamaian dalam hubungan antar negara di wilayah Asia Tenggara. Hubungan kedua tujuan ini dapat disimpulkan sebagai sasaran jangka panjang ASEAN, yaitu membangun perdamaian dan stabilitas regional yang dicapai melalui usaha perkembangan ekonomi, sosial, dan

⁷³ Sabir, *Loc. Cit.*

kebudayaan di kawasan Asia Tenggara melalui usaha bersama sebagai sasaran jangka pendek ASEAN.⁷⁴

Dalam pembukaan Deklarasi Bangkok, ASEAN secara tegas mengungkapkan tekadnya untuk mencapai tujuan perdamaian dan stabilitas regional melalui penggunaan frasa-frasa seperti, “Mengingat seterusnya..”; “Meninginkan seterusnya...”; “Menyadari seterusnya...”. Selain itu, pernyataan Adam Malik pada KTT ASEAN I juga menggarisbawahi komitmen Indonesia dan anggota ASEAN lainnya untuk melihat Asia Tenggara menjadi kawasan yang mampu mandiri dan berdiri teguh di tengah tekanan pengaruh negatif dari luar. Adam Malik menyampaikan bahwa “Indonesia ingin melihat Asia Tenggara berkembang menjadi wilayah yang mampu berdiri atas kakinya sendiri dan cukup kuat untuk mempertahankan diri dari pengaruh negatif apapun yang datang dari luar”.⁷⁵

Meskipun pada tahun-tahun awal pembentukannya, ASEAN belum sepenuhnya berhasil mencapai proyek-proyek besar terkait ekonomi dan perdamaian. Namun setidaknya, organisasi ini telah mengambil langkah pertama yang penting dalam membentuk solidaritas regional, yaitu menjadi platform pembelajaran dan dialog antaranggota. Tak hanya itu, ASEAN juga menjadi simbol kesetiakawanan di kawasan Asia Tenggara untuk mengembangkan kerja sama regional yang lebih luas. Dengan kata lain, langkah awal ASEAN bertujuan untuk

⁷⁴ Durmaz, Ra'ees, and Hossain, *Op. Cit.*, p. 303.

⁷⁵ Sabir, p. *Op. Cit.*, 45.

memastikan keamanan nasional, kemerdekaan, dan kemajuan ekonomi, serta mewujudkan komunitas yang kuat dan mandiri di kawasan Asia Tenggara.⁷⁶

2.1.3 Proses Pembentukan ASEAN Community (Masyarakat ASEAN)

Seiring berjalannya waktu, ASEAN mengalami kemajuan yang signifikan di bidang politik dan ekonomi, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN) pada tahun 1971. ASEAN kemudian membentuk Traktat Persahabatan dan Kerja sama (TAC) pada tahun 1976, yang menjadi landasan bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menjalani hubungan yang harmonis di kawasan. ASEAN juga berkembang seiring dengan bertambahnya anggota organisasi, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Anggota terbaru yang resmi bergabung adalah Timor Leste, yang memperoleh keanggotaan ASEAN pada tahun 2022.⁷⁷

Salah satu tonggak penting lainnya adalah ketika ASEAN mendapatkan status hukum sebagai organisasi regional melalui ratifikasi Piagam ASEAN (ASEAN Charter) pada KTT ke-13 tanggal 20 November 2007. ASEAN Charter merupakan kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang mengikat bagi seluruh anggota ASEAN dan mulai berlaku pada tahun 2008 setelah semua anggota meratifikasi dokumen tersebut. Sebagai instrumen dasar suatu organisasi internasional, ASEAN Charter memberikan dasar hukum yang mengatur berbagai

⁷⁶ Shee Poon-Kim, 'A Decade of ASEAN, 1967-1977', *Asian Survey*, 17.8 (1977), 753–770 (p. 755) <<https://doi.org/10.2307/2643336>>.

⁷⁷ ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang, ASEAN*, 19th edn (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010), p. 3.

aspek termasuk struktur organisasi, keanggotaan, penyelesaian konflik, serta tujuan dan maksud organisasi.⁷⁸

Pembentukan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) diawali dengan KTT ke-9 ASEAN yang diadakan di Bali dan menghasilkan deklarasi bernama Bali Concord II pada tahun 2003. Masyarakat ASEAN secara keseluruhan bertujuan untuk mengembangkan wilayah Asia Tenggara yang memiliki karakteristik terbuka, stabil, damai, dan sejahtera. Karakteristik ini bertujuan untuk membangun hubungan saling peduli dan kemitraan yang dinamis. Masyarakat ASEAN dibangun atas dasar tiga pilar utama, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), Masyarakat Politik Keamanan ASEAN (ASEAN Political Security Community), serta Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community). Ketiga pilar tersebut saling terikat serta berperan untuk memperkuat satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran, stabilitas keamanan, perdamaian, dan kerja sama lintas sektor yang mendukung.⁷⁹

Salah satu pilar utama dalam Masyarakat ASEAN, yakni ASEAN Political Security Community (APSC), diprakarsai oleh Indonesia. APSC memiliki karakteristik diantaranya, kesamaan nilai dan norma, kekompakan, perdamaian, dan ketahanan yang kuat.⁸⁰ Pentingnya APSC terletak pada peran fondasi politik yang kokoh dalam mendukung integrasi ekonomi. Keberhasilan integrasi ekonomi

⁷⁸ dan Teknologi Republik Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset and Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Buku Bahan Pengajaran ASEAN Bagi Pendidikan Menengah* (Jakarta: Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, 2021), p. 32.

⁷⁹ Ratnaningsih Hidayati, *ASEAN Satu Komunitas Satu Identitas*, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish, 2015), p. 3.

⁸⁰ Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama ASEAN, and Kementerian Luar Negeri, *ASEAN Selayang Pandang*, 22nd edn (Jakarta, 2017), p. 17.

memerlukan kerangka politik-keamanan yang mendukung, termasuk kepercayaan yang tinggi di antara negara-negara anggota (*high degree of trust*). Kepercayaan ini hanya dapat dicapai melalui transparansi (*transparency*) dan perilaku yang dapat diprediksi (*predictable behavior*) antara negara-negara tersebut.⁸¹

Cetak Biru APSC 2025 didasarkan pada Piagam ASEAN dan instrumen lainnya, serta berbagai dokumen yang memberikan prinsip-prinsip dan kerangka kerja untuk kerja sama politik-keamanan ASEAN dan pelaksanaannya. Cetak Biru APSC (2009-2015) akan tetap berlaku karena memiliki signifikansinya penting untuk keberlanjutan ASEAN. Namun, diperlukan pendekatan proaktif dan berwawasan ke depan (*forward-looking*) untuk memastikan bahwa Cetak Biru APSC 2025 tetap relevan dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta mampu mengatasi tantangan yang mungkin muncul di masa depan.⁸² Masyarakat ASEAN mencerminkan perkembangan kerja sama ASEAN dari waktu ke waktu, sesuai dengan tujuan awal pendiri-pendiri ASEAN untuk membangun persahabatan dan kerja sama guna menciptakan wilayah yang aman, damai, dan sejahtera.⁸³

Proses terbentuknya masyarakat internasional ASEAN diawali oleh sekelompok negara di kawasan Asia Tenggara yang mencapai kemerdekaan dan mengukuhkan statusnya sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh. Dengan

⁸¹ Igor Herlisrianto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Menggagas Pembentukan ASEAN Security Community Tahun 2003' (Universitas Indonesia, 2008), p. 199 *et. Seq* <<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/126157-SK-HI 008 2008 Her f - Faktor-faktor - HA.pdf>>.

⁸² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 'ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama' (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2018), p. 12 <<https://meaindonesia.ekon.go.id/wp-content/uploads/2018/10/ASEAN-2025-Melangkah-Maju-Bersama.pdf>>.

⁸³ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset and Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Op. Cit.*, p. 79.

diperolehnya kemerdekaan ini, negara-negara di kawasan Asia Tenggara dihadapkan pada tugas penting untuk memenuhi kepentingan nasional. Hal ini termasuk upaya mempertahankan kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, dan menjaga integritas bangsa. Kesadaran akan kompleksitas tuntutan ini mendorong pemimpin-pemimpin negara untuk mengakui perlunya kerja sama dengan negara-negara lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama.⁸⁴ Selain itu, persamaan pengalaman sejarah kolonialisme membawa mereka pada suatu kebutuhan historis, yakni kebutuhan untuk membangun solidaritas dalam menghadapi tantangan bersama. Setelah menghadapi berbagai konflik internal dan regional, mereka membentuk suatu wadah organisasi regional yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, regionalisme di Asia Tenggara memunculkan kesatuan politik melalui pembentukan ASEAN, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Karakteristik ASEAN yang pluralistik dari segi ideologi, aktor, bentuk pemerintahan, dan lain sebagainya, tidak menghentikan ASEAN untuk setidaknya memiliki kesamaan kepentingan dalam aspek-aspek seperti kedaulatan, kerja sama politik, pembangunan ekonomi, pemeliharaan keamanan regional, dan pemeliharaan perdamaian bersama.⁸⁵

Perkembangan ASEAN saat ini tidak terbatas hanya sebagai forum diskusi, namun juga menjadi institusi regional yang memiliki landasan hukum yaitu Piagam ASEAN. Serangkaian deklarasi seperti Deklarasi Bangkok dan deklarasi ZOPFAN

⁸⁴ Dewa Gede Sudika Mangku and I Putu Kusuma Wardana, 'Peran The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 Dalam Penyelesaian Sengketa Di ASEAN', *Ganesha Civic Education Journal*, 4.2 (2022), p. 346 <<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>>.

⁸⁵ Abdulgani, *Op. Cit.*, p. 19.

(1971), ASEAN Concord (1976), TAC dan pembentukan Sekretariat ASEAN (1976), mencerminkan kemampuan ASEAN dalam mengatur hubungan-hubungan para anggota melalui sistem aturan dan lembaga. Pembentukan aturan dan lembaga ini menunjukkan bahwa ASEAN telah berhasil mengubah sistem negara-negara di kawasan menjadi suatu masyarakat internasional atau tatanan regional yang teratur (*regional order*).⁸⁶ Dengan demikian, ASEAN mewakili suatu bentuk masyarakat internasional yang memiliki ciri-ciri masyarakat yang berbasis pada negara, didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, berfokus pada kesejahteraan rakyat, terikat oleh nilai-nilai dan norma bersama, serta memiliki semangat kebersamaan, tujuan, dan identitas bersama. Jose Tavares, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, menggambarkan transformasi ini dengan mengatakan, "Landasan kerja sama sederhana yang dibentuk lima puluh tahun lalu di Bangkok telah bermetamorfosis menjadi suatu Masyarakat ASEAN yang memiliki struktur regional yang maju".⁸⁷

2.2 Prinsip Non Intervensi Sebagai Norma Internasional di Kawasan Asia Tenggara

Pada bagian ini, akan dijelaskan tentang bagaimana prinsip non intervensi menjadi salah satu norma utama yang berperan dalam menjaga kelangsungan ASEAN, serta bagaimana prinsip tersebut tercermin dalam dokumen-dokumen resmi ASEAN.

Prinsip non intervensi memegang peran sentral dalam kerangka sistem negara Westphalia. Implikasinya tercantum dalam Piagam PBB serta beberapa

⁸⁶ Durmaz, Ra'ees, and Hossain, p. 302.

⁸⁷ Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, 'Masyarakat ASEAN', *Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN* (Jakarta, September 2017), p. 5 <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/724/halaman_list_lainnya/majalah-masyarakat-asean>.

dokumen yang dikeluarkan oleh organisasi regional lainnya, termasuk African Union, Organization of American States, dan Arab League. Keberadaan prinsip dasar doktrin non intervensi telah lama mempengaruhi dinamika Asia Tenggara, bahkan sebelum terbentuknya ASEAN. Konsep ini tercantum pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955, dan kemudian diterapkan dalam semua pernyataan politik inti ASEAN, khususnya dalam Deklarasi Bangkok 1967.⁸⁸

Masyarakat di kawasan Asia Tenggara tidak memiliki tradisi kerja sama regional yang kuat seperti Masyarakat Eropa, melainkan drama penjajahan yang menampilkan tradisi adu domba antar suku, eksploitasi sumber daya dan kekayaan yang berlangsung bertahun-tahun. Dampak dari perpecahan tersebut terus mempengaruhi hubungan antarnegara di Asia Tenggara, bahkan setelah mencapai kemerdekaan dari penjajahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada saat pembentukan ASEAN, hubungan di antara kelima negara anggotanya dipenuhi oleh rasa curiga dan konflik.⁸⁹ Selain itu, situasi dan kerja sama kolektif antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga tidak luput dari campur tangan dari kekuatan-kekuatan global seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, China, dan Jepang. Intervensi tersebut menjadi pemicu ketegangan, permasalahan, dan hambatan dalam proses pembangunan nasional serta dinamika hubungan di Asia Tenggara. Prinsip non intervensi menjadi pijakan yang memungkinkan negara-negara tersebut untuk mengatasi beban sejarah dan kompleksitas dalam menghadapi konflik Perang Dingin yang semakin intensif di Indochina.⁹⁰

⁸⁸ Acharya, p. 57.

⁸⁹ Sabir, *Op. Cit.*, p. 57 *et Seq.*

⁹⁰ Ian, *Op. Cit.*, p. 6.

Dengan menekankan pada aspek kepentingan bersama yang melampaui perbedaan etnis, agama, dan budaya, serta komitmen pada prinsip non intervensi, ASEAN bertujuan untuk menciptakan wadah yang menjembatani perbedaan pemahaman, mengatasi sengketa, dan mencegah memburuknya situasi konflik di antara negara-negara anggota untuk menjembatani perbedaan pemahaman, menangani sengketa, dan mencegah berkembangnya konflik.⁹¹

Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak, menyampaikan alasan ketidakstabilan hubungan negara-negara di Asia Tenggara selama dua decade sebelumnya disebabkan oleh campur tangan negara-negara besar dalam urusan regional. Dia menjelaskan bahwa keamanan dan perdamaian hanya dapat diperoleh dan dipertahankan melalui penerapan politik netralisasi, yang bertujuan untuk mencegah kawasan tersebut menjadi medan pertempuran antara kepentingan negara-negara besar yang saling berbenturan. Sehubungan dengan hal ini, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Tun Ismail, mengusulkan gagasan netralisasi ASEAN dalam Sidang Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN keempat pada Maret 1971. Langkah ini diambil oleh pemerintah Malaysia sebagai bentuk proklamasi bahwa kawasan Asia Tenggara tidak akan lagi dijadikan wilayah yang dapat dibagi-bagi oleh pengaruh negara-negara besar. Dalam kerangka gagasan netralisasi tersebut, terdapat beberapa aspek penting yang perlu didiskusikan bersama. Pertama-tama, penting untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar non-interferensi dan non-agresi yang harus secara tegas

⁹¹ Rommel A. Curaming and others, *Memahami Sejarah Bersama: Sebuah Paket Pengajaran Untuk Asia Tenggara, Unit 4: Membangun Visi Asia Tenggara*, ed. by Sally Kantar, 1st edn (United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization, 2019), p. 19.

diterima. Kedua, keberadaan negara-negara asing di wilayah tersebut perlu dihapuskan guna mencegah terjadinya perselisihan kekuatan internasional di Asia Tenggara. Ketiga, negara-negara di kawasan perlu merencanakan langkah-langkah dan mengambil tanggung jawab dalam memastikan keamanan di antara negara-negara anggota. Terakhir, kerja sama regional perlu ditingkatkan sebagai elemen kunci implementasi konsep ini.⁹²

Sebagai respons terhadap wacana mengenai gagasan netralisasi yang diajukan oleh Pemerintah Malaysia, dilakukan pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 26-27 November 1971 yang menghasilkan Deklarasi ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality). Deklarasi tersebut secara substansial menegaskan Asia Tenggara sebagai wilayah yang damai, bebas dan netral dari intervensi negara-negara asing, sekaligus memperkuat solidaritas dan kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN. Deklarasi ini mengandung prinsip-prinsip keamanan utama yang menjadi dasar dan evolusi awal ASEAN, termasuk norma non intervensi, larangan penggunaan kekuatan, dan prinsip otonomi regional.⁹³

Implementasi netralisasi melalui ZOPFAN diarahkan sebagai jangka panjang yang direncanakan untuk dicapai secara bertahap. Konsensus pertama yang dicapai oleh negara-negara di kawasan adalah makna dan hak-hak netralitas negara. Kesepakatan mengenai netralisasi yang diadopsi oleh anggota-anggota ASEAN mengimplikasikan bahwa mereka tidak akan terikat dalam aliansi militer dengan

⁹² Sabir, *Op. Cit.*, p. 116 *et Seq.*

⁹³ ASEAN, 'Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration', 1971 <<https://www.pmo.gov.my/wp-content/uploads/2019/07/ZOPFAN.pdf>>.

negara-negara adikuasa. Kekuatan militer hanya akan dimobilisasi untuk tujuan pertahanan diri dan menjaga stabilitas dalam konteks domestik yang didasarkan pada prinsip hidup berdampingan secara damai. Menteri Luar Negeri Filipina, Carlos Romulo, menilai ASEAN telah berhasil menyepakati prinsip dasar terkait hubungan mereka kedepannya.⁹⁴

Prinsip non intervensi ditegaskan kembali dalam dokumen Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang disetujui pada KTT I Bali tahun 1976. TAC menjadi *code of conduct* hubungan para anggota. TAC sebagai panduan berperilaku membantu menciptakan fondasi yang diperlukan bagi perdamaian serta stabilitas di kawasan. TAC juga dijadikan sebagai landasan dalam penyelesaian secara damai. Prinsip-prinsip yang dirumuskan dalam TAC diantaranya, penghormatan kedaulatan serta integritas teritorial dan nasional semua bangsa, menegaskan hak setiap negara untuk hidup bebas dan terlepas dari segala bentuk campur tangan maupun paksaan pihak luar dalam mengatur urusan dalam negeri, menekankan penyelesaian konflik secara damai tanpa menggunakan ancaman maupun kekerasan, serta membangun kerja sama yang efektif di antara negara-negara anggota ASEAN.⁹⁵ Prinsip-prinsip tersebut adalah bentuk komitmen resmi terhadap cita-cita regionalisme ASEAN. Traktat ini membantu ASEAN untuk terus meningkatkan rasa saling percaya diantara negara-negara anggotanya dan mitra eksternalnya. Salah satu langkah yang diterapkan adalah dengan menguatkan forum-forum kerja sama yang diinisiasi oleh ASEAN, seperti The ASEAN

⁹⁴ Sabir, *Op. Cit.*, p. 199.

⁹⁵ ASEAN, 'Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia' (ASEAN, 1976) <<https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/outward-looking-community/treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-tac/>>.

Regional Forum, The ASEAN Plus Three, The East Asia Summit, The ASEAN Defense Ministers' Meeting.⁹⁶ Dengan terdapatnya TAC pada Piagam PBB ayat 102 semakin memperkuat posisi traktat ini dalam organisasi ASEAN.⁹⁷

Sikap-sikap yang berkaitan dengan non intervensi juga tercantum dalam Pasal 2 Piagam ASEAN. Ayat pertama dalam pasal ini mewajibkan semua negara untuk menghormati kepemilikan setiap negara termasuk, kedaulatan, integritas wilayah, dan identitas nasional. Oleh sebab itu, dalam ayat kedua dijelaskan kembali tentang larangan untuk ikut campur dalam kebijakan dalam negeri anggota, maupun subjek negara manapun, yang dapat mengancam kedaulatan, integritas wilayah serta stabilitas politik dan ekonomi.⁹⁸

Berbagai faktor seperti pandangan sejarah, budaya, ekonomi dan politik negara-negara memiliki peran yang signifikan dalam membentuk dan mengembangkan prinsip non intervensi dalam berbagai instrumen hukum yang dimiliki oleh ASEAN. Salah satu perkembangan signifikan dari prinsip non intervensi adalah penerapannya dalam kerangka kerja ASEAN yang dikenal dengan ASEAN Way. ASEAN Way merupakan salah satu bentuk transformasi yang memungkinkan negara-negara anggota untuk membentuk dan mengembangkan ASEAN berdasarkan pada karakteristik, norma, dan kebutuhan mereka dalam kerangka solidaritas regional. Hiro Katsumata mendeskripsikan empat poin dari ASEAN Way yaitu, prinsip non-interferensi, penerapan diplomasi tenang (*quiet*

⁹⁶ Beginda Pakpahan, *Indonesia, ASEAN, Dan Ketidakpastian Hubungan Internasional*, ed. by Patricius Cahandar and Robertus MahatmaChryshna, 1st edn (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018), p. 106.

⁹⁷ Sabir, *Op. Cit.*, p. 68.

⁹⁸ ASEAN, *The ASEAN Charter*, ASEAN (ASEAN, 2007) <<https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf>>.

diplomacy), larangan penggunaan kekerasan, dan pengambilan keputusan melalui konsensus.⁹⁹

Prinsip non-interferensi dalam ASEAN Way berperan dalam mengatur batasan-batasan yang jelas dalam pola kerja sama dan interaksi anggota ASEAN. Batasan-batasan tersebut mencakup aturan yang mewajibkan adanya persetujuan atau izin dari negara yang terkait sebelum mengambil keputusan yang berdampak pada negara tersebut. Selain itu, prinsip ini juga melarang negara-negara anggota lain untuk mengambil tindakan yang dapat merusak semangat kerja sama dan rasa persatuan di antara anggota-anggota ASEAN. Dalam konteks interaksi antara negara-negara anggota, ASEAN Way juga menitikberatkan pada praktik diplomasi yang tenang. Ketika menghadapi isu-isu yang sensitif, negara-negara anggota memilih untuk melakukan dialog bilateral secara diam-diam yang bersifat tidak mencolok. Pendekatan ini diciptakan untuk merespons isu-isu yang kompleks tanpa menimbulkan ketegangan atau konfrontasi terbuka di antara negara-negara anggota. Prinsip lain yang tercakup dalam ASEAN Way adalah pencegahan penggunaan kekerasan atau pendekatan militer dalam interaksi antara negara-negara anggota. Hal ini bertujuan untuk memelihara karakteristik hubungan kekeluargaan yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam ASEAN. Semangat kekeluargaan ini juga dipertahankan melalui mekanisme pengambilan keputusan melalui konsensus, di mana semua negara anggota harus mencapai kesepakatan sebelum tindakan diambil. Meski demikian, prinsip ASEAN Way memiliki kelemahan dalam

⁹⁹ Hiro Katsumata, 'Reconstruction of Diplomatic Norms in Southeast Asia: The Case for Strict Adherence to the "ASEAN Way"', *Journal of International and Strategic Affairs*, 25.1 (2003), p. 106 <<https://doi.org/10.1353/csa.2011.0032>>.

menangani isu-isu sensitif, karena pendekatannya cenderung berfokus pada menghindari isu-isu tersebut dengan maksud menjaga semangat kekeluargaan di antara negara-negara anggota ASEAN.¹⁰⁰

ASEAN adalah sebuah organisasi yang berbasis pada negara dan mengutamakan kedaulatan sebagai hal terpenting yang harus dijaga dan dihormati oleh para anggota. Negara sebagai institusi utama dari masyarakat internasional ASEAN, memiliki peran utama dalam pembentukan peraturan dan undang-undang yang sesuai dengan norma-norma perilaku dan praktik politik yang dilakukan.¹⁰¹ Dengan memusatkan prioritas pada kedaulatan, ASEAN mengadopsi prinsip non intervensi sebagai pijakan dasar yang harus diikuti oleh setiap negara anggotanya dalam berinteraksi. Doktrin non intervensi menjadi elemen penting dalam konteks mengatasi masalah keamanan internal di negara-negara ASEAN. Sebagai entitas politik yang relatif baru dengan struktur politik dan pemerintahan yang belum kuat, ancaman utama terhadap keamanan nasional negara-negara ASEAN cenderung bersifat internal. Konflik domestik tersebut kemudian diperparah oleh faktor-faktor dari luar, termasuk campur tangan dari negara-negara tetangga yang dapat memicu ketegangan dalam hubungan antarnegara. Oleh sebab itu, sulit untuk mempertahankan stabilitas dalam tatanan regional tanpa adanya kesepakatan mengenai pentingnya menjaga keamanan wilayah berdasarkan prinsip non intervensi.

¹⁰⁰ Alvela S. Putri and others, 'Dampak Prinsip-Prinsip Dasar ASEAN Terhadap Pola Kerjasama ASEAN Menghadapi Krisis Kudeta Myanmar', *Nation State: Journal of International Studies*, 4.1 (2021), p. 130 *et Seq* <<https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/nsjis/article/view/488>>.

¹⁰¹ Bull, *Op. Cit.*, p. 68.

Prinsip ini menjadi norma internasional bersamaan dengan aturan lainnya seperti konsensus, keamanan terhadap kekerasan dan menghormati kedaulatan dan mematuhi setiap perjanjian yang telah disepakati. Aturan-aturan tersebut sejatinya bertujuan untuk memelihara koeksistensi dalam konteks hubungan negara-negara anggota ASEAN. Kehadiran unsur-unsur non-intervensi dalam berbagai dokumen resmi ASEAN secara jelas mencerminkan komitmen kolektif untuk mempromosikan keberadaan yang saling menghormati dan tidak campur tangan di antara anggota-anggota ASEAN.

2.3 Penerapan Prinsip Non Intervensi Di Kawasan Asia Tenggara

2.3.1 Konflik Kuil Phreah Vihear dan Laut China Selatan

Prinsip non intervensi, sebagai bagian dari ASEAN Way merupakan komponen penting dalam penyelesaian konflik secara damai di Asia Tenggara. Hal ini tercermin dalam tindakan ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan Kuil Phreah Vihear antara Thailand dan Kamboja pada tahun 2008-2011. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, ASEAN harus tetap bersikap netral dengan terus melakukan langkah-langkah penyelesaian secara damai yang dilakukan melalui dialog, konsultasi, negosiasi, dan pendekatan bilateral. Indonesia, sebagai Ketua ASEAN tahun 2011, mengadakan Jakarta Border Committee, sebagai langkah untuk memediasi Thailand dan Kamboja. Pertemuan bilateral yang bersifat informal tersebut menghasilkan kesepakatan gencatan senjata antara kedua pihak.¹⁰² Dalam konflik Laut China Selatan yang melibatkan China dan negara

¹⁰² Ilham Putra Dewanta, 'Implementasi Prinsip Non-Intervensi Sebagai ASEAN Way Dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Sengketa Secara Damai Atas Pelanggaran HAM Di Negara-Negara Anggota', p. 97 *et. Seqqq* (Universitas Islam Indonesia, 2018).

anggota ASEAN yaitu Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia, ASEAN merumuskan Code of Conduct dengan kerangka dasar konsensus, sebagai upaya penyelesaian masalah dengan tetap menghormati aspek kedaulatan negara-negara yang terlibat.¹⁰³

2.3.2 Bencana Siklon Nargis

Pada tahun 2008, rezim militer Myanmar menghentikan bantuan kemanusiaan bagi korban Siklon Nargis di negara mereka. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran akan campur tangan dari negara-negara asing dalam urusan internal Myanmar, mengingat bencana Siklon Nargis terjadi ketika Myanmar sedang berjuang untuk mengembalikan kebebasan politik dalam negeri. Para donatur internasional kemudian meminta ASEAN untuk menyelesaikan masalah ini. ASEAN mengadakan Pertemuan Khusus pada Mei 2008 di Singapura untuk mengusulkan tiga pilihan penanganan untuk Myanmar. Dari ketiga pilihan tersebut, Myanmar memilih mekanisme penanganan bencana yang difasilitasi oleh ASEAN, yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip ASEAN, daripada opsi mekanisme bantuan PBB atau mekanisme Responsibility to Protect (R2P). Hal ini memberikan kesempatan bagi ASEAN untuk memperkuat hubungan antara negara-negara anggotanya.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid.*, p.85 *et Seqq.*

¹⁰⁴ Tita Yorinda, 'Studi Kasus ASEAN Dalam Memfasilitasi Penanganan Bencana Siklon Di Myanmar Tahun 2008-2011', *Jurnal Hubungan Internasional*, 1.1 (2018), 2-4 <[https://repository.unair.ac.id/75398/3/JURNAL_Fis.HI.40 18 Yor p.pdf](https://repository.unair.ac.id/75398/3/JURNAL_Fis.HI.40%2018%20Yor%20p.pdf)>.

2.3.3 Rohingya

Hubungan ASEAN dengan Myanmar di kawasan Asia Tenggara dapat dikatakan sebagai ujian besar bagi penerapan prinsip non intervensi dan ASEAN Way. Sejak tahun 2003, ASEAN telah menyatakan keprihatinan mereka terhadap berbagai situasi krisis di dalam negeri Myanmar yang melibatkan pelanggaran HAM, tindakan otoriter pemerintah, dan ketidakstabilan politik dalam negeri.¹⁰⁵ Salah satu bukti konkret dari ketidakstabilan politik akibat ketegangan etnis dan agama serta pelanggaran HAM adalah kasus Rohingya.¹⁰⁶ Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi ASEAN karena keberadaan Myanmar di ASEAN sangat mempengaruhi posisi ASEAN di dunia. Kavi Chongkittavorn, mantan asisten khusus Sekretaris Jenderal ASEAN mengungkapkan bahwa jika ASEAN tidak mengatasi krisis Rakhine dengan serius, maka hal ini dapat berpotensi merusak kredibilitas dan posisi internasional ASEAN.¹⁰⁷ Prinsip non-intervensi dan pengambilan keputusan melalui konsensus, yang melibatkan semua anggota termasuk Myanmar, memaksa ASEAN dan negara-negara anggotanya untuk menyelesaikan masalah Rohingya dengan kecepatan yang lambat dan dalam batasan yang nyaman bagi semua pihak.

¹⁰⁵ Moe Thuzar, 'The Myanmar Crisis and ASEAN: Implications, Opportunities and Limitations', December 2020, 2021, p. 45
<http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/joint_research/series20/pdf/chapter04.pdf>.

¹⁰⁶ ASEAN Studies Centre, *The State of Southeast Asia: 2020*, 2020, p.7.

¹⁰⁷ Geddie and Aung. *Loc. Cit.*

Tabel 2. 1 What is your assessment of ASEAN's response to the crisis in Myanmar's Rakhine State?¹⁰⁸

Country	Strongly disapprove	Disapprove	Approve	Strongly approve
ASEAN	16.1%	38.5%	39.1%	6.3%
Brunei	16.5%	43.3%	34.0%	6.2%
Cambodia	23.1%	34.6%	42.3%	0.0%
Indonesia	16.2%	35.1%	37.9%	10.8%
Laos	4.4%	21.7%	65.2%	8.7%
Malaysia	27.0%	44.2%	23.3%	5.5%
Myanmar	13.9%	27.9%	43.9%	14.3%
Philippines	18.3%	46.0%	32.8%	2.9%
Singapore	15.8%	52.7%	29.7%	1.8%
Thailand	15.6%	35.4%	44.8%	4.2%
Vietnam	6.6%	27.6%	64.5%	1.3%

Sumber: Survei online The State of Southeast Asia: 2020

Hasil survei The State of Southeast Asia tahun 2020 yang dilakukan oleh ASEAN Studies Centre at ISEAS-Yusof Ishak Institute terhadap 1.308 responden dari sepuluh negara anggota ASEAN yang berprofesi dalam bidang penelitian, bisnis dan keuangan, sektor publik, masyarakat sipil, dan media, menunjukkan bahwa krisis di Rakhine State merupakan topik sensitif yang membagi negara-negara anggota ASEAN menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menghormati prinsip non intervensi dan kelompok yang berusaha menjaga kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional dalam komunitas internasional. Terdapat pembagian yang hampir merata antara keduanya. Survei tersebut menunjukkan bahwa 54,6% responden merasa tidak puas dengan tindakan ASEAN dan 45,4% lainnya merasa puas. Ketidakpuasan terbesar berasal dari Malaysia, Singapura, dan Filipina, sedangkan dukungan terkuat ditemukan di Laos, Vietnam, dan Myanmar.

¹⁰⁸ *Ibid*, p. 11.

Tabel 2. 2 What should ASEAN do better to address the Rakhine crisis?¹⁰⁹

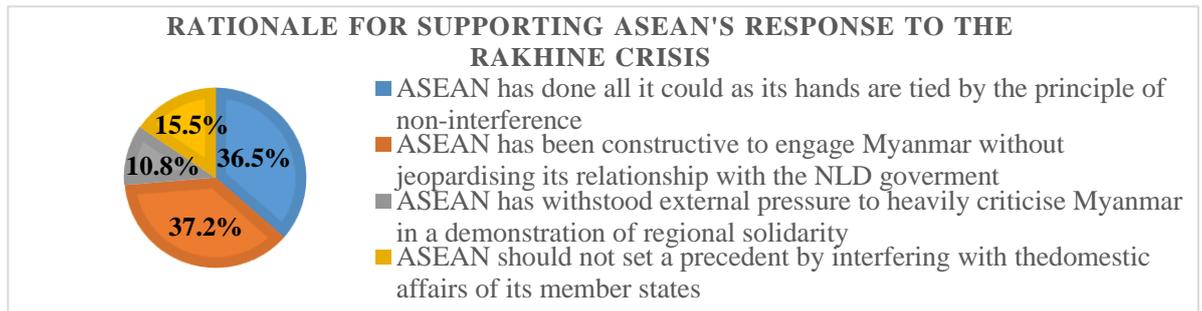
Country	ASEAN should increase humanitarian assistance to the Rohingya in camps outside Myanmar.	ASEAN should mediate between the Myanmar government and the Rakhine and Rohingya communities.	ASEAN should step up diplomatic pressure on Myanmar.	ASEAN should lead a regional peacekeeping operation in Rakhine State.
ASEAN	19.2%	43.0%	23.7%	14.1%
Brunei	22.4%	41.4%	19.0%	17.2%
Cambodia	13.3%	53.3%	26.7%	6.7%
Indonesia	15.8%	34.2%	35.5%	14.5%
Laos	33.3%	50.0%	16.7%	0.0%
Malaysia	11.2%	38.8%	31.0%	19.0%
Myanmar	31.4%	43.1%	4.9%	20.0%
Philippines	21.6%	38.6%	25.0%	14.8%
Singapore	17.8%	43.4%	27.6%	11.2%
Thailand	20.4%	46.9%	24.5%	8.2%
Vietnam	13.5%	65.4%	17.3%	3.8%

Sumber: Survei online The State of Southeast Asia: 2020

Tabel 2.2 merupakan hasil survei dari responden yang tidak puas dengan cara ASEAN menyelesaikan permasalahan Rohingya. Berdasarkan hasil survei di atas, responden yang tidak puas mengusulkan tindakan mediasi antara pemerintah Myanmar dengan komunitas Rakhine dan Rohingya sebagai langkah yang sebaiknya diambil oleh ASEAN.

¹⁰⁹ *Ibid*, p. 12.

Diagram 2. 1 Rationale for supporting ASEAN's response to the Rakhine crisis¹¹⁰



Sumber: Survei online The State of Southeast Asia: 2020

Di sisi lain, responden yang puas dengan langkah yang diambil ASEAN menganggap bahwa ASEAN telah bertindak secara konstruktif dengan melibatkan Myanmar tanpa merusak hubungan keduanya. Selain itu, ASEAN juga dianggap telah melakukan segala upaya yang memungkinkan dalam kerangka prinsip non-intervensi.

Dalam konteks hubungan internasional, khususnya dalam hal keterlibatan dengan Myanmar, ASEAN menekankan pentingnya stabilitas dan prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara-negara anggotanya. ASEAN tetap berpegang pada ciri khas ASEAN Way dan norma non intervensi dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, ASEAN menghindari penggunaan sanksi ekonomi atau boikot sebagai cara untuk mengubah situasi internal Myanmar. Pemberian sanksi bagi ASEAN dinilai sebagai tindakan yang "tidak efektif, bahkan berpotensi berbahaya bagi rakyat Myanmar." ASEAN mengedepankan pendekatan "diplomasi yang tenang" dengan komunikasi internal yang lebih intens dengan perwakilan Myanmar dalam pertemuan politik tertutup ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN mempertahankan peran sebagai komunitas keamanan yang

¹¹⁰ *Ibid*, p. 13.

mengedepankan stabilitas dan keamanan regional sambil tetap menghormati kedaulatan dan prinsip-prinsip ASEAN Way yang mendasari hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara.¹¹¹ Prinsip-prinsip ini juga yang membentuk dasar tindakan dan respon ASEAN serta anggota-anggotanya dalam menghadapi isu seperti kasus Rohingya di kawasan Asia Tenggara, yang akan dijelaskan lebih lanjut dan rinci dalam bab berikutnya.



¹¹¹ Acharya, p. 114 *et Seq.*